

Research Article

**Nilai Egaliter pada Novel Syeikh Siti Jenar
Karya Agus Sunyoto**

Liris Purwa Maharsi, M. Kholid Muslih

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : November 29, 2022

Revised : February 9, 2023

Accepted : Maret 8, 2023

Available online : Maret 10, 2023

How to Cite: Liris Purwa Maharsi, and M. Kholid Muslih. 2023. "Nilai Egaliter Pada Novel Syeikh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):1-14. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.394.

*Corresponding Author: Email: maharsiagio8@gmail.com (Liris Purwa Maharsi)

Egalitarian Values in the Novel Syeikh Siti Jenar Works by Agus Sunyoto

Abstract. Cases of lack of welfare, many caused by acts of discrimination among the community. Therefore, the pace of an interaction needs to be regulated in order to place all positions and portions of society appropriately so as to create justice appropriately. This discussion cannot be separated from the role of religion as a guideline and the state as the place where all interactions take place. The purpose of this study is to determine the role of religion applied by Abdul Jalil or Sheikh Siti Jenar in the renewal of Dukuh Lemah Abang which is intended to arouse the decline and discrimination of the community in the royal sphere so that it can return to the teachings of Tawhid. And in turn this Tawhid teaching became the basis of the social and political life of the community. This research with the type of Library research uses Paul Ricoeur's hermeneutic approach as a method of reading literary works. As a result of this study, First, found egalitarian values in the social and political context in the renewal of Lemah Abang from the novel story of Sheikh Siti Jenar. Second, making the community able to base their actions on interacting in accordance with the teachings of Tawhid.

Keywords: Egalitarian, Social, Political, Novel, Tawhid, Welfare.

Abstrak. Kasus kurangnya kesejahteraan, banyak disebabkan oleh tindak diskriminasi di kalangan masyarakat. Karena itu, melajunya suatu interaksi perlu diatur guna menempatkan seluruh posisi dan porsi masyarakat secara sesuai sehingga tercipta keadilan secara tepat. Pembahasan ini tidak dapat terlepas dari peran agama sebagai pedoman dan negara sebagai tempat seluruh interaksi terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran agama yang diterapkan oleh Abdul Jalil atau Syeikh Siti Jenar

pada pembaharuan Dukuh Lemah Abang yang dimaksudkan untuk membangkitkan keterpurukan dan diskriminasi masyarakat di lingkup kerajaan sehingga dapat kembali kepada ajaran Tauhid. Dan selanjutnya ajaran Tauhid ini menjadi dasar dari kehidupan social dan politik masyarakat. Penelitian dengan jenis Library Reasearch ini menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Recoeur sebagai metode pembacaan karya sastra. Sebagai hasil penelitian ini, Pertama, menemukan nilai-nilai egaliter pada lingkungan social dan politik pada pembaharuan Lemah Abang dari cerita novel Syekh Siti Jenar. Kedua, menjadikan masyarakat dapat mendasarkan tindakan daam berinteraksi sesuai dengan ajaran Tauhid

Kata Kunci: Egaliter, Social, Politik, Novel, Tauhid, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Keadilan dan kesejahteraan yang diusung dengan berdirinya tanah air Indonesia, mulai menemui pertanyaan. Masih banyak masyarakat yang ada pada kondisi kesejahteraan yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan sosial yang ada seperti lingkungan pergaulan yang kurang berkualitas, tingkat kemiskinan dan penganggurannya yang masih tinggi (Ismail, 2015, p. 52), kurangnya sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang kurang terolah (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014, p. 159).

Sementara itu, pada ranah hukum, sikap diskriminasi terhadap rakyat jelata dan para elit yang dibiarkan melakukan pelanggaran dengan keringanan hukuman. Belum cukup sampai di situ, kekacauan berpikir yang tidak diimbangi dengan pendalaman pemahaman, sehingga menjadikan jarak tipis antara antara (ghirah) kesemangatan keagamaan dengan nafsu tersembunyi (Sunyoto, 2004a, p. IX) yang menjadikan agama sebagai pendukung permainan politik. Situasi dan kondisi keadilan yang seperti ini cukup menjadi indikasi untuk banyak melakukan perbaikan (Ritaudin, 2017, p. 168), karena keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Dengan permasalahan yang telah disebutkan, dibutuhkan tindakan untuk menegakkan keadilan bagi setiap orang yaitu dengan tidak menjadikan tingkatan-tingkatan sosial kehidupan sebagai tolak ukur dan tidak menjadikan segolongan lebih utama dari golongan lain dalam ranah hukum dan pergaulan (AlMaany.com, n.d.). Ketentuan ini merujuk pada beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tinggi-rendah derajat manusia hanya dibedakan oleh ketakwaan (Al-Hujarat, n.d., p. 13). Karena itu dibutuhkan peran persamaan derajat atau hukum egaliter untuk diterapkan di dalam lingkungan masyarakat (Alo Lliweri, 2019, pp. 204–209) Konsep ini disebutkan oleh Hasan Abu Tholib dengan istilah al-musawah al-Insaniyah dan al'adalah atau keadilan di dalam kitabnya al-musaawah al-insaniyah fil Islam (Hasan Abu Tholib, 2014, pp. 6–7).

Optimalisasi konsep egaliter ini tidak akan luput dari kerjasama peran agama, dan negara, sebagai hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Agama memerlukan negara sebagai lapangan kekuasaan dari agama, demikian negara memerlukan agama dengan tujuan sebagai fungsi control dari penyimpangan-penyimpangan (Kesuma, 2017, p. 330). Terdapat kesesuaian pendapat menurut Din Syamsudin yang berkaitan sebelumnya dengan Al-Maududy bahwa untuk membasmi kejahatan, dan memperbaiki kerusakan pada ranah politik, sosial, dan ekonomi

adalah dengan memasukan pesan-pesan dari al-Qur'an ke dalam kehidupan nyata (Shonia & Hermawati, 2020, p. 41).

Pada penelitian ini akan ditunjukkan pada penelitian Pustaka novel. Tujuannya adalah sebagai perantara untuk menyampikan nilai egaliter yang ada dalam alur cerita novel secara mudah dan sederhana. Penyampaian cerita ini diperantarai oleh seorang tokoh sentral, yaitu Syekh Siti Jenar, seorang sufi nusantara. Ia dikisahkan berperan sebagai seorang pendiri serta guru sebuah pesantren yang dibangun di tengah miliu kerajaan-kerajaan. Pesantren tersebut bernama Giri Amparan Jati di Cirebon. Ia juga seorang sesepuh penduduk Lemah Abang (Sunyoto, 2004a, pp. 29-33), yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar

Novel sebagai karya fiksi banyak dipenuhi dengan ungkapan metaforik, dan konotatif, juga hasil renungan kontemplatif penulis, karena itu perlu adanya landasan teori guna memvalidkan penemuan nilai egaliter yang terdapat pada Novel Syekh Siti Jenar karya Agus Sunyoto ini. Landasan teori tersebut berupa nilai egaliter menurut tiga ilmuan, yaitu Sayyid Qutb, Abu A'la al-Maududy dan Hasan Abu Tholib

Data yang dipaparkan dalam penelitian akan berbentuk deskripsi sebagai tahap pengumpulan data dan paragraph sebagai hasil analisis. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menjadi gambaran dalam memperbaiki umat Islam dalam keteraturan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan secara khusus, juga menyeluruh di berbagai kalangan masyarakat umum.

Pada penelitian sebelumnya, pada pembahasan tentang egaliter, terdapat beberapa judul penelitian, diantaranya: Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah (Ritadin, 2017), dengan hasil penemuan menemukan tatanan politik yang egalitarianistis dari telaah system pemerintahan Negara Madinah. Birokrasi dan Kultur Struktur Rasional-Egaliter: Sumbangan Agama untuk Penguat Good Governance (Achmad, 2007) dengan hasil temuan kerja keberagaman yang dapat menyediakan porsi dan potensi rakyat miskin (konsep egaliter) dalam mendukung good governance. Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga dan Kepuasan Keluarga pada Perempuan yang Berperangan Ganda (Anwar, 2015) dengan sasaran penciptaan lingkungan kerja family friendly bagi wanita, sehingga terdapat kesetaraan lingkup kerja bagi perempuan dengan peran ganda.

Sementara kajian terhadap novel ini sendiri yang telah dilakukan sebelumnya seperti: Konsep Masyarakat Syekh Siti Jenar dalam Novel Hepatology Karya Agus Sunyoto (Saputra, 2019), Moralitas Asketisme Syekh Siti Jenar: Studi Trilogi Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto (Sujadi, 2017). Rekonstruksi Fakta Sejarah Tentang Syekh Siti Jenar Suluk Sang Pebaharu Karya Agus Sunyoto (Damayanti, 2021). Dengan seluruh penelitian yang telah disebutkan, kajian nilai egaliter pada Novel Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto semoga dapat menjadi penambah hazanah literasi sebagai karya baru

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai egaliter yang terdapat pada novel Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data juga mengurai permasalahan (Kaelan, 2005, p. 41). Pada penelitian ini menjadikan karya sastra yaitu novel berseri sebagai objek penelitian, karena itu penelitian ini dapat disebut sebagai Library Research atau studi Pustaka.

Sebagai karya sastra murni, penelitian pada novel diperlukan beberapa literatur pendukung, yang difungsikan sebagai landasan teori. Landasan teori ini sendiri difungsikan sebagai dasar-dasar operasional penelitian atau bisa disebut sebagai tuntunan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian (Kaelan, 2005, pp. 239–240) sehingga alur dari suatu penelitian lebih sistematis. Beberapa literatur yang difungsikan sebagai landasan teori adalah kitab Sayyid Qutb dengan kitabnya al-‘Adaalah al-Ijtima’iyah fil Islam, Hasan Abu Tholib dengan kitabnya al-Musaawah al-Insaaniyyah fil Islam, Nu‘man Abdul Rasaz dengan kitabnya Nizom as-Siyaasi fil Islaam, Abu A’la al-Maududy dengan kitabnya Nazriyatu Islam as-Siyasiyah

Di awal akan dilakukan pembacaan heuristic terhadap novel dari jilid pertama sampai yang terakhir, identifikasi masalah sebagai latarbelakang masalah penelitian, pemahaman terhadap definisi egaliter dan pengumpulan data dengan pembacaan berulang terhadap novel.

Pembacaan data yang dihasilkan dari novel dengan landasan teori yang digunakan akan menghasilkan data berbentuk deskriptif yaitu berbentuk keterangan atau interpretasi yang tepat dan sistematis (Kaelan, 2005, p. 58) sebagai metode penulisan awal penelitian. Sebelumnya peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika Paul Recoeur sebagai teori pembacaan terhadap karya sastra. Dengan teori ini peneliti memiliki hak distansiasi, atau peran otonomi peneliti terhadap teks yang menjadikan peneliti dapat membaca data dengan pendekatan sosial dan politik (Pamungkas, 2016, p. 75) disertai landasan teori yang sudah terfokus. Pada tahap ini, analisis dari penjabaran data dari cerita yang sesuai dengan landasan teori menjadi alur dari analisis peneliti (Nyoman Kutha Ratna, 2010, p. 302)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Egaliter Secara Bahasa Dan Istilah

Istilah egaliter berarti bersifat sama atau sederajat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sementara pengertian sama atau persamaan dipandang dalam Bahasa Arab berarti sawa yusaawi musaawatan. Yang berarti persamaan derajat sesama manusia sama dihadapan Sang Pencipta. Dengan persamaan hak atas keimanan dan kedekatan kepada Allah. tidak terkecuali para raja dan penguasa, tetap ada pada hak yang sama di setiap tempat dan waktu, karena itu persamaan atau musawah antar manusia juga merupakan nilai keadilan Allah untuk seluruh manusia (Hasan Abu Tholib, 2914, p. 6).

Apabila dilihat secara bahasa musawah dapat disandingkan dengan hukum, membentuk arti doktrin kesetaraan sipil (madaiyah), politik, (assiyaasiyyah), dan social (ijtima’iyah) antar manusia Sementara musawah disandingkan dengan perbuatan bermakna al-‘adll atau keadilan, yaitu penyeteraan antar manusia dalam hak dan kewajiban (AlMaany.com, n.d.)

Searah dengan makna di atas, Muhammad Imarah menjelaskan konsep persamaan di sini adalah konsep persamaan realistik. Berupa konsep persamaan di depan hukum, yaitu menghilangkan perbedaan tempat kelahiran, keturunan, warna kulit, etnis, dan keyakinan agama. Selain itu persamaan juga mencakup memberi kesempatan pada semua warga, bangsa, dan negara dalam kerangka sosial dan negara (Ritaudin, 2017, p. 399)

Keberadaan masyarakat, perpolitikan, dan hubungan sosial merupakan komponen-komponen yang ada di dalam suatu wilayah yang disebut dengan negara. Dalam perkumpulan komponen tersebut dibutuhkan peraturan guna menertibkan laju kehidupan di bawah naungan pemerintahan. Peraturan tersebut terdiri dari hukum dan pekerjaan yang dihasilkan dari peran agama dengan nilai etik dan idealismenya. Sehingga dapat membimbing perjalanan hidup masyarakat. (M. Kholid Muslih at All, 2019, pp. 74–78), sebagaimana adanya hubungan agama dan negara yang sangat berkaitan.

Ditinjau dari pembacaan peneliti, nilai-nilai egaliter yang mendominasi pada Novel Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto ini ada pada lingkup sosial dan politik. Nilai-nilai ini muncul di awal pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat Lemah Abang yang masih kental dengan system kerajaan. Pembaharuan ini berupa suatu tatanan baru yang berasaskan konsep Tauhid. Abdul Jalil ingin menghidupkan kembali tatanan kehidupan yang sudah pernah dihidupkan oleh nabi, guru suci, para tapa, dan para bijak dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad (Sunyoto, 2004e, pp. 131–132).

Gambaran Umum Novel Dan Biografi Syekh Siti Jenar

Buku ini dituliskan bertujuan untuk keluar dari rutinitas penulisan tokoh Syekh Siti Jenar sebagai tokoh kontroversial. Buku ini mencoba menjadikan tokoh Syekh Siti Jenar sebagai teladan, tokoh utama dan orang soleh di dalam cerita. Hal ini yang membedakan para penulis dengan penulis buku ini, yaitu Agus Sunyoto. Ia memilih tokoh ini sebagai perantara dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam di lingkungan masyarakat, dengan latarbelakang sejarah tokoh sebagai seorang sufi Indonesia

Dalam kisah ini, Syekh Siti Jenar tinggal di Barat Nusa Jawa, yaitu di Lemah Abang. Mula-mula Lemah Abang sedang mengalami keterpurukan, yaitu banyaknya problematika kehidupan yang menyulut keresahan derita, air mata, dan pertumpahan darah. (Sunyoto, 2004a, p. 6) Cerita ini bermula dari seorang anak bernama Raden Ketib berusia enam belas tahun yang diutus ayahnya untuk menuntun ilmu di Pesantren Giri Amparan Jati (Muhammad Fajar Pramono, 2016, p. 16). Ia ingin sekali mengetahui seluk-beluk sejarah pesantren yang dirahasiakan oleh pihak pesantren, yaitu sejarah para generasi pertama pesantren. Ia merasa sangat penasaran mengenai sejarah itu, terutama tentang Syekh Siti Jenar yang didengarnya mempunyai sejarah kontroversial (Sunyoto, 2004a, pp. 4–17)

Agus Sunyoto sebagai penulis Novel Syekh Siti Jenar ini, menjadikan tokoh Syekh Siti Jenar sebagai tokoh utama dalam cerita. Syekh Siti Jenar lebih sering disapa sebagai Abdul Jalil di dalam cerita. Ketika kecil ia dikenal dengan nama San

Ali. Ayah kandungnya bernama Ki Datuk Sholeh dan Ibunya Bernama Nyi Rara Anjung. Selain itu ia juga memiliki ayah asuh bernama Ki Samadullahi

Syeikh Siti Jenar digambarkan sebagai sosok rendah hati, (Sunyoto, 2004a, p. 37) rajin, soleh, sederhana dan selalu haus akan ilmu. Sunyoto, 2004a, pp. 29–33). Nama San Ali sendiri berarti Sembilan ekor kumbang. Nama ini diambil dari Bahasa Jawa Kuno, (Sunyoto, 2004a, p. 37) Pemberian nama ini juga berdasarkan tujuan ingin menjadikan San Ali sebagai kumbang yang membawa kesuburan dan kesejahteraan bagi negerinya (Sunyoto, 2004a, pp. 37–43).

Sepanjang perjalanan perjuangannya dalam menyebarkan dakwah Islam, dua ajaran penting yang dibawa oleh Abdul Jalil ini adalah ajaran Kekhalifahan untuk memahami masyarakat dalam peranya sebagai wali Allah di Bumi dan Peranya dalam mengubah pembagian hirarki kerajaan menjadi masyarakat Ummah yang menjadikan seluruh derajat manusia adalah sama terkecuali yang paling bertakwa. Teori sederhana ini yang kemudian mengubah derajat dan tingkatan kehidupan yang masyarakat di antara beberapa kekusaan kerajaan (Sunyoto, 2004f, pp. 75–153)

Nilai Egaliter Pada Lingkup Sosial

Nilai egaliter sebagai pembaruan pada lingkup sosial, disampaikan dalam kisah Abdul Jalil, diantaranya adalah asas keadilan dalam Islam, pondasi keadilan sosial, dan hubungan antar Individu di dalam masyarakat bersosial.

Untuk membina kerukunan di dalam kehidupan masyarakat, Abdul Jalil ingin membuat perubahan dengan memahami asas keadilan sosial Islam. Keadilan ini berbasas pada hati nurani manusia dan peraturan sosial dengan kesadaran inti bahwa Allah telah menghitung seluruh perbuatan seseorang di dunia dan di akhirat.

Asas keadilan dalam Islam tersebut disampaikan dengan adanya peraturan baru pada masyarakat yang tinggal di tanah terlarang Lemah Abang. Peraturan berpakaian bagi seluruh lapisan masyarakat dengan penutup tubuh bagian atas dan bawah, tata cara bermuamalah, seperti larangan mengambil paksa hak orang lain; larangan bertengkar; menjadi warga yang jujur punya rasa malu dan lurus hati. Seluruh peraturan baru tersebut sejatinya merujuk syari'at Islam dengan tujuan ingin menyampaikan ajaran Tauhid secara naluri dan amali (Sunyoto, 2004, pp. 113–122). Dan bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, seperti sering melakukan upacara persembahan (sesajen) dari hasil merampok, mereka akan mendapatkan akibatnya berupa musibah adanya hama tikus, terjangan angin puyuh, dan serangan penyakit ganas yang akan merusak pertanian dan pemukiman mereka (Sunyoto, 2004c, pp. 303–307)

Dalam menjalankan keadilan dengan asas di atas kemudian di terapkan di menjadi pondasi keadilan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Sayyid Qutb menyebutkan tiga hal utama, yaitu emansipasi Sayyid Qutb, Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam (Beirut: Dar al-Syuruq, 1990), 32.. Pertama, Emansipasi (at-Taharur al-wijdany al-mutlaq), kesetaraan antar manusia (al-musawah al-insaniyah al-kamilah), dan solidaritas social (at-Takaful al-ijtima'I al-watsiq), dengan adanya peran perasaan atas kebutuhan diri dan lingkungan terhadap sesuatu seperti persamaan hak, dengan

(Sunyoto, 2004a, p. 65)

tujuan ketaatan kepada Allah. Dengan emansipasi inipun seseorang akan terhindar dari rasa takut atas rizki, jabatan, musibah, serta mempercayakan seluruh kehidupan kepada Allah (Sayyid Qutb, 1990, pp. 32–38).

Digambarkan dalam cerita, perjalanan Abdul Jalil bertemu dengan kepala suku Kanbi dari daerah pedesaan yang miskin. Abdul Jalil mengibaratkan manusia adalah percik api dan Allah adalah Bunga Api Abadi. Sementara itu, Allah mengirimkan seorang Avatar Agung bernama Muhammad SAW. Muhammad mengajarkan bahwa seluruh manusia sebagai percik api memiliki derajat yang sama dan hanya ketakwaan mereka yang membedakan. Kisah ini kemudian disandingkan dengan kisah Nabi Muhammad yang membandingkan Bilal Bin Rabah, seorang budak miskin dengan Abu Jahal, seorang bangsawan juga paman nabi. Bilal Bin Rabah diakui Nabi Muhammad lebih mulia (Sunyoto, 2004b, pp. 203–207)

Kedua, Solidaritas sosial, dalam kehidupan berdampingan terdapat terdapat batasan-batasan yang perlu dijalankan dan tidak ada kebebasan secara mutlak. Solidaritas ini memfungsikan peran orang lain seperti diri sendiri, mengedepankan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu. Dan adanya kesadaran untuk mengikuti batasan-batasan dalam menikmati kebebasan agar terjaga dari nafsu untuk memenuhi kesenangan pribadi (Sayyid Qutb, Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam, 52).. Abdul Jalil menyampaikan bahwa kewajiban bagi manusia adalah untuk saling tolong menolong antar sesama, tanpa melihat latar bangsa, Bahasa, dan agama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya dan seburuk-buruk manusia adalah yang menjadi bencana bagi sesamanya (Sunyoto, 2004f, pp. 41–42). Pada kisah lain, Abdul Jalil tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kenikmatan antara kekasih (auliya') dan Sang Pengasih (al-Waly). Melainkan ia tetap memainkan perannya di dalam kehidupan dunia, termasuk menjadi anggota Jama'ah, Keterpanggilanya menjadi anggota Jama'ah ini setelah ia mengorbankan kepentingan pribadinya meninggalkan keluarga tercinta untuk membela golongan orang-orang teraniyaya (Sunyoto, 2004b, pp. 133–136)

Dengan asas keadilan dan dasar peraturan keadilan sosial, Nu'man Abdul Razaq memberi pendapat acuan hubungan antar individu di ranah sosial. Hubungan tersebut diantar sebagaimana harmoni keterkaitan dan kesinambungan dari setiap orang kepada orang lain yang ditujukan untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama sesuai dengan hukum Allah (Nu'man Abdul Razaq, 2007, pp. 51–52). Abdul Jalil menceritakan hubungan antar manusia seperti awak kapal. Kapal sebagai ibarat kehidupan bersosial, jatuh banggunya suatu bangsa seutuhnya tergantung kepada kepada kehendak Sang Rajadiraja semesta, Yang Memberi Kedamaian dan kemuliaan.

Dari sejarah bangsa-bangsa terdahulu, keruntuhan suatu bangsa banyak disebabkan oleh penyembahan mereka kepada Thaghut atau selain Allah. Padahal Allah sebagai Sang Rajadiraja adalah penguasa Semesta Ciptaan, kiblat sesembahan dan gantungan harapan. Untuk mewujudkan itu semua, manusia butuh peran pemimpin muslim yang ada di kapal adalah membentuk para penumpang kapal menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga mereka dapat terjaga dari mengumbar hawa nafsu berlebihan, menikmati kesyahwatan tanpa kendali, dan menjaga diri dari melanggar seluruh aturan yang telah ditetapkan Sang Rajamahadiraja, untuk

menjadikan kapal tetap aman dan tidak dirampas oleh kekuasaan musuh (Sunyoto, 2004c, pp. 64–65)

Nilai Egaliter Pada Lingkup Politik

Pada lingkup lain, Abdul Jalil juga mengerahkan pembaharuannya. Ia melakukan beberapa penataan dalam pemerintahan. Beberapa di antaranya adalah empat prinsip yang menjadi dasar negara Islam, kriteria seorang pemimpin, tiga ciri negara demokrasi, empat pondasi dasar peraturan politik. Pada ke-empat komponen tersebut terdapat nilai egaliter yang ingin diterapkan oleh Abdul Jalil di Lemah Abang dan beberapa daerah yang menghendaki untuk mengikuti pembaruannya di sekitar tanah Lemah Abang.

Untuk membentuk suatu negara atau melakukan perubahan pada wilayah Lemah Abang, Abdul Jalil mempunyai empat prinsip dasar negara Islam (Abu A'la al-Maududi, 1967, pp. 26–28), yaitu: *Pertama*, Pada negara Islam ini tentunya dilarang untuk menyembah kepada selain Allah. Karena itu Abdul Jalil dan kawanannya harus bekerja keras untuk merubah latarbelakang penduduk kerajaan yang menyembah raja-rajanya, matahari, bulan, bintang, makhluk gaib, dan sesama manusia (Sunyoto, 2004f, p. 86). *Kedua*, mengakui otoritas Nabi, dan *ketiga* mengakui manusia sebagai kholifah Allah. Sebagai makhluk yang paling sempurna, hendaknya berpedoman kepada tatanan hukum Ilahi (syari'at) yang berasal dari sabda Allah dan teladan Nabi Muhammad. Tanpa pedoman hukum ilahi, seseorang bisa kehilangan arah dalam mewujudkan diri sebagai wakil Allah di bumi (Sunyoto, 2004f, p. 86). *Keempat*, melakukan musyawarah. Menurut Abdul Jalil, musyawarah ini menjadi hal penting bukan sekedar untuk mendapatkan dukungan atas gagasannya, melainkan mendidik masyarakat untuk bisa menggembala diri mereka sendiri sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bersama, juga dapat menjalani hidup sesuai dengan kodrat sebagai ciptaan yang paling sempurna di bumi (Sunyoto, 2004f, p. 243)

Berkaca kepada tiga ciri negara demokrasi al-Maududy, terdapat pula tiga ciri negara demokrasi (Abu A'la al-Maududi, 1967, pp. 46–48) yang dimasukan oleh Abdul Jalil ke dalam pembentukan pemerintahan di Lemah Abang. tiga diantaranya adalah *Pertama*, setiap anggota dari masyarakat suatu negara merupakan kholifah, karena itu tugas utama Abdul Jalil adalah untuk menyadarkan manusia tentang posisi dan keberadaan mereka sebagai makhluk sempurna yang juga sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifah fil ardh) (Sunyoto, 2004e, p. 194). *Kedua*, Ia menjelaskan bahwa di dalam Islam perbedaan derajat dan kedudukan manusia tidak didasarkan atas keturunan, pangkat, kedudukan, dan kekayaan, melainkan oleh ketakwaan, yaitu kedekatan manusia terhadap Tuhan-Nya. Sehingga jalan pembebasan atas hak-hak atas diri seseorang bisa dicapai oleh siapa saja, termasuk hak kebebasan mengembangkan diri (Sunyoto, 2004d, p. 22). dan *Ketiga*, tidak berlakunya hukum diktator, Abdul Jalil mengambil pelajaran dari kerajaan Majapahit yang bangga dengan sifat-sifat adhigang (paling unggul), adhigung (paling agung), adhiguna (paling hebat), rajas (nafsu syahwat yang berkobar), jaya (penakhlukan), niratisaya (tak tertandingi), dan nirbhaya (tak kenal takut), yang pada akhirnya membawa petaka pada keturunannya, karena mereka salng membunuh, mengumbar kekuatan untuk berebut kekuasaan.

Pada akhirnya dibutuhkan nilai kerukunan, keselarasan, dan kesederhanaan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini (Sunyoto, 2004d, pp. 24–28)

Di tanah Lemah Abang, Abdul Jalil menerapkan empat pondasi dalam suatu peraturan politik. Empat pondasi tersebut diantaranya adalah *Pertama*, musyawarah (syura). Yang termasuk dalam musyawarah adalah penyampaian dan bertukar pendapat berbentuk nasehat sebagai musyawarah sederhana, yang tidak menghasilkan ketetapan dan musyawarah yang menghasilkan suatu ketetapan berupa peraturan (Nu'man Abdul Razaq, 2007, pp. 165–168). *Kedua*, kebebasan (hurriyyah), dengan hak asasi bagi seluruh manusia berdasarkan hukum. Kebebasan ini mencakup kebebasan bergerak, berkumpul, menyampaikan pendapat, berkeyakinan dan bertempat tinggal. *Ketiga*, keadilan (al-'adl) dengan memberikan hak masing-masing orang sehingga tidak ada ketertindasan dan permusuhan (Nu'man Abdul Razaq, 2007, p. 190) *Keempat*, kesetaraan (almusaawah) yang menjadikan setiap orang dapat merasakan hak-hak sesama manusia (Nu'man Abdul Razaq, 2007, pp. 198–199)

Empat hal di atas diterapkan oleh Abdul Jalil secara satu persatu. *Pertama*, untuk menyatukan pendapat yang bermacam-macam dari berbagai kabilah, perlu dilakukan musyawarah agar dapat membentuk kerja sama, tujuan yang sama, sekaligus dapat bergerak bersama. Musyawarah ini menjadi ciri khas dari masyarakat ummah yang ingin dibentuk pada masyarakat Lemah Abang (Sunyoto, 2004f, p. 111). Salah satu penerapannya adalah dilakukannya musyawarah antara dalam pemilihan anggota wali Sembilan yang dilakukan oleh Abdul Jalil bersama dengan Syaikh Ibrahim Akbar, Syaikh Bentong, haji Musa dan para tokoh Campa di Caruban (Sunyoto, 2004d, p. 98) *Kedua*, Warga Lemah Abang bebas untuk memilih agama, cara mencari nafkah, pemimpin, tatanan hidup dan mengikuti perkumpulan yang sesuai dengan keinginannya selama tidak melanggar hak-hak manusia lain (Sunyoto, 2004f, p. 104). *Ketiga*, Kebijakan Abdul Jalil yang menghibahkan tanah kepada siapa yang ingin tinggal di Lemah Abang, membuat banyak kepala keluarga mendatangi Lemah Abang untuk mendirikan rumah di dekat Tajuk Agung dan mengubah padang alang-alang menjadi lahan pertanian. Kunci pertumbuhan pesat Lemah Abang yang dilakukan Abdul Jalil (Sunyoto, 2004f, p. 76) serta larangan melanggar batas kepemilikan yang telah disamakan, agar tidak menimbulkan perselisihan (Sunyoto, 2004f, p. 189). *Keempat*, Kesetaraan ini didukung dengan penggantian kata ganti kawula menjadi insun, sebagaimana raja berbicara dengan rekan raja, walaupun lawan bicara seorang raja adalah rakyat jelata (Sunyoto, 2004f, p. 182). Konsep ini berupa menempatkan setiap individu pada derajat yang sama, dengan hak-hak dasar yang sama, yang tidak saling mengganggu (Sunyoto, 2004d, p. VII). Perubahan ini dimaksudkan untuk mengubah kasta pada lingkungan kerajaan menjadi masyarakat ummah, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Musa terhadap Bani Israil untuk membebaskan tanah Kanaan yang tercekam oleh nilai-nilai perbudakan (Sunyoto, 2004f, p. 189)

Setelah disebutkan tentang empat prinsip dasar negara Islam, tiga ciri negara demokrasi, empat pondasi dasar peraturan politik, tidak lepas dari bentuk pembaharuannya adalah terdapat beberapa kriteria pemimpin.

Seseorang dapat dipilih menjadi pemimpin dilihat dari ketakwaannya, kepercayaan masyarakat tentang biografi, perangai, akhlaknya, serta ketaatan terhadap hukum dengan tidak melanggar apa yang menjadi perintah dan larangannya sebagaimana hukum tersebut sesuai dengan syari'at yaitu berdasarkan al-Qur'an dan

Sunnah. Selain itu pemimpin diutamakan dari seorang laki-laki (Abu A'la al-Maududi, 1967, pp. 52-53).

Padananya di Lemah Abang kriteria seorang pemimpin atau kholifah adalah *pertama* wajib berasal dari kalangan manusia beriman yang telah dikenal jujur, terpercaya, dan pemberani. *Kedua*, wajib cerdas dan berpengetahuan luas. *Ketiga*, berpengetahuan mendalam tentang agama, tata negara, dan kehidupan masyarakat. *Keempat*, hidup sebagai zahid sejati agar dapat bertindak adil. *Kelima*, rela berkorban jiwa, raga, dan harta untuk melindungi dan memakmurkan masyarakat yang dipimpinya. *Keenam*, seorang pekerja keras karena kesadaran diri sebagai wakil Allah di muka bumi. *Ketujuh*, menjadi panutan dan dicintai oleh masyarakat, juga menjadi teladan dengan akhlaknya yang mulia (Sunyoto, 2004f, p. 243)

Apabila dijabarkan, terdapat tujuh kriteria seorang pemimpin. Diantara kriteria tersebut adalah: *Pertama*, pemimpin yang terpilih adalah yang paling bertakwa. *Kedua*, seorang pemimpin tidak memiliki keutamaan apapun dalam hal hukum. Sehingga hukum yang berlaku padanya sepadan dengan hukum yang berlaku terhadap orang lain. *Ketiga*, seorang pemimpin melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara. *Keempat*, seorang pemimpin memutuskan suatu haq dan bathil suatu perkara bukan berdasarkan pendapat terbanyak, melainkan merujuk pada ketentuan yang ada dalam hukum Islam. *Kelima*, seorang pemimpin tidak menjadikan kepemimpinannya sebagai bagian dari silsilah keturunannya. *Keenam*, seorang pemimpin tidak melakukan diskriminasi atas pendapat siapapun. *Ketujuh*, di dalam pemerintahan Lembaga penegak hukum ada di luar bagian parlemen (Abu A'la al-Maududi, 1967, pp. 53-57)

Dari tujuh kriteria di atas, Abdul Jalil menjelaskan dalam kisah perjalanan hidupnya. Dimulai dari kriteria kedua. Dalam menyempurnakan gagasan tentang khalifah, Abdul Jalil meminta petunjuk kepada Sang Nrpatri Dewasimha. Setelah mendengar penjelasannya, Abdul Jalil teringat dengan Rasulullah ketika membangun komunitas ummah di Yatsrib, Rasulullah menyatakan, apabila ia mendapati Fatimah terbukti melakukan pencurian, maka Rasulullah sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Karena hukum yang adil adalah hukum yang harus dipatuhi setiap penghuni negeri dan tidak memandang kawula atau raja (Sunyoto, 2004d, pp. 63-72). *Ketiga*, Untuk menyelesaikan peperangan, Abdul Jalil mengajak Pangeran Ali Rahmatullah menjadi juru damai dalam musyawarah. Musyawarah ini dilakukan sebagai sikap untuk melindungi para kawula, karena peperangan ini telah banyak menyengsarakan para kawula (Sunyoto, 2004d, p. 105).

Keempat, dalam memutuskan antara hak dan bathil Abdul Jalil merujuk pada ilmu hikmah dan ilmu 'irfan yang ia pahami. Ilmu hikmah adalah ilmu yang mengajarkan untuk meletakkan sesuatu secara tepat sesuai dengan tempat dan porsinya. Ilmu ini berkaitan dengan usaha-susaha untuk mencapai keseimbangan antara ilmu dan amal sehingga suatu keputusan dapat mencapai keadilan yang semestinya. Sementara ilmu irfani, adalah ilmu yang berkaitan dengan pengungkapan rahasia atas Khazanah Tersembunyi Ilahi. Seorang pemimpin dengan ilmu ini akan senantiasa menentukan sesuatu berdasarkan hukum Allah. Karena menentukan perkara tanpa mengedepankan nafsu pribadi dapat mencapai keputusan yang adil. Selain itu keberhasilan dalam mengendalikan nafsu merupakan nilai jihad, dalam

pandangan 'irfan (Sunyoto, 2004e, pp. 241-242). *Kelima*, belajar dari pemerintahan Majapahit yang menjadikan sebagai pewaris tahta yang menjadikan suatu tahta menjadi perebutan. Lebih dari itu apabila pewaris tahta kerajaan raja yang jahat dan mengabaikan Astabrata (Sunyoto, 2004d, pp. 34-35)

Keenam, pengangkatan Nyi Mas Gandasari oleh Sri Mangana sebagai Agra-Senapati (panglima tinggi) Caruban menuai perbedaan pendapat dari banyak pihak. Tetunggul Rajagaluh yang menganggap kebijakan ini adalah siasat Licik Sri Mangana untuk dapat mengalahkan Prabu Surawasesa yang hanya bisa dikalahkan oleh Wanita. penentangan lain berasal dari pemuka masyarakat, dan tetunggul Caruban Larang, yang menganggap Sri Mangana kurang bijaksana dengan keputusannya karena menurut mereka pemimpin perempuan terlarang memimpin laki-laki. Tidak cukup di situ penentangan juga datang dari Angga sebagai wali nagari Kuningan, dan Ki Demang Singagati, mantri kepercayaannya. Akhirnya Sri Mangana mengumpulkan para pemuka masyarakat dan tetunggul Caruban untuk memusyawarahkan keputusannya. Dalam musyawarah itu pun ternyata masih banyak perbedaan pendapat. Karena kesadaran Sri Mangana dengan kondisi genting yang kurang kondusif dengan terlalu banyaknya pendapat, akan sangat merugikan, makai a putuskan untuk memegang sendiri jabatan agra-senapati Caruban Larang dan memilih dua orang panglima wakil senapati di medan tempur, yaitu wali nigari Kuningan dan Nyi Mas Gandasari (Sunyoto, 2004d, pp. 248-250)

Ketujuh, Majelis Wali Songo sebagai tempat meminta nesehat dan berkah ruhani para adipati penguasa wilayah duniawi (Sunyto, 2004, p. 311). Majelis Wali Songo memisahkan kekuasaan kholifah menjadi dua. Pertama, Kholifah yang berkuasa menjalankan pemerintahan duniawi dipegang oleh seorang adipati yang ditunjuk oleh para adipati. Kedua, kekuasaan ruhani yang dipegang oleh Majelis Wali Songo sebagai dewan penasehat hukum atau aturan-aturan syarak, akan membawahi adipati dan para adipati (Sunyoto, 2004, p. 295)

KESIMPULAN

Dengan latar belakang kerajaan yang masih kental dengan tradisi kasta dan golongan, Abdul Jalil ingin membawa pembaharuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh utusan-utusan sebelumnya, untuk kembali membawa ajaran Tauhid atas masyarakat Lemah Abang. Dengan ajaran tersebut Abdul Jalil ingin menyadarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama . Apabila kedudukan tersebut berbeda, maka perbedaannya dilihat berdasarkan ketakwaannya kepada Allah. Karena itu Abdul Jalil ingin membentuk lingkungan masyarakat menjadi lingkungan yang egaliter sehingga tidak ada tindakan semena-mena dan ketidakadilan. Seorang ilmuwan muslim menyebut egaliter ini dengan al-musawah al-insaniyah atau al'adalah Pembaharuan ini ia mulai dengan melakukan pembaharuan pada lingkup sosial dan politik.

Pada lingkup sosial, terdapat asas keadilan dalam Islam. Keadilan ini merujuk kepada hati nurani dan peraturan sosial dengan kesadaran bahwa Allah menghitung seluruh perbuatan seseorang di dunia dan di akhirat. Awal penerapan egaliter adalah dengan menerapkan ajaran Tauhid yang menghidupkan hati nurani untuk memperbaiki interaksi dengan orang lain seperti sikap jujur dan lurus hati. Asas

keadilan ini sesuai untuk diterapkan dalam pondasi keadilan social, untuk membentuk lingkungan yang lekat dengan emansipasipasi, kesetaraan antar manusia, dan solidaritas sosial. Dengan tiga hal tersebut akan terbentuk kerukunan untuk saling menghargai, tolong-menolong, tidak melakukan diskriminasi atau membedakan antar orang, menjadikan diri sebagai orang yang bermanfaat, dan mengedepankan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Kerukunan di atas juga merupakan hasil dari interaksi yang sesuai di ranah social, menurut Nu'man Abdul Razaq.

Tidak cukup pada ranah social, terdapat beberapa pembaharuan yang ingin diterapkan Abdul Jalil untuk memperbaiki Duku Lemah Abang, terutama pada ranah politik. Di awal Abdul Jalil menjelaskan empat prinsip yang menjadi dasar negara Islam. Pertama, Menyembah hanya kepada Allah sehingga mengajak masyarakat Lemah Abang untuk meninggalkan persembahan terhadap raja, matahari, maluk ghaib, dan sesame manusia. Kedua, mengakui otoritas nabi Muhammad sebagai utusan yang menyampaikan syari'at Islam dan menjadikannya teladan. Ketiga, mengakui seluruh manusia adalah wakil Allah, dan keempat, sebagai komponen terakhir untuk melengkapi dari keseluruhan empat hal tersebut adalah melakukan musyawarah. dari prinsip ketiga dan keempat ditujukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama atas hak dan kewajiban setiap orang sebagai kholifah. Sehingga adanya musyawarah adalah wadah untuk merangkul perbedaan para wakil Allah

Di dalam negara Islam, memiliki pula kriteria pemimpinnya. Satu inti utama dari kriteria pemimpin adalah kepercayaannya terhadap ajaran Tauhid atau hak atas suatu kepemimpinan adalah kepada siapa yang paling bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak dan kepribadian yang telah diakui baik dan diterima oleh masyarakat atau penduduk yang menjadi kekuasaan pemerintahannya. Al-Maududy, pada konsep negara Islam, mempunyai tiga ciri negara demokrasi, yaitu setiap anggota masyarakat adalah kholifah, perbedaan derajat tidak berdasarkan keturunan; pangkat; kedudukan; kekayaan, dan tidak melakukan pemerintahan diktator yang akan merugikan suatu negara tanpa aspirasi dan pendapat yang dipertimbangkan. Tak tertinggal Abdul Jalil menerapkan pula empat hal yang menjadi pondasi peraturan politik, yaitu musyawarah, kebebasan berpendapat dan berkembang, keadilan, dan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la al-Maududi. (1967). *Nazrotul Islam as-Siyasiyah*. Dar al-Fikr.
- Achmad, U. (2007). *Birokrasi Dan Kultur Struktur Rasional-Egaliter: Sumbangan Agama Untuk Penguatan Good Governance*. *Millah*, 7(1), 39–61.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol7.iss1.art3>
- Al-Hujarat. (n.d.).
- AlMaany.com. (n.d.). *Kamus Ma'any*. Retrieved November 18, 2022, from <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar>
- Alo Liliweri. (2019). *Konfigurasi Dasar Teori-Teori Komunikasi Antar Budaya*. Katalog Dalam Terbitan.

- Anwar, H. (2015). Orientasi Peran Egaliter, Keseimbangan Kerja-Keluarga Dan Kepuasan Keluarga Pada Perempuan Yang Berperan Ganda. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.26858/talenta.viii.5227>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI Daring*. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/egaliter>
- Damayanti, N. (2021). Rekonstruksi Fakta Sejarah Tentang Syekh Siti Jenar Suluk Sang Pembaharu Karya Agus Sunyoto. IAIN Purwokerto.
- Hasan Abu Tholib. (2014). *Al-Musawah al-Insaniyah fil Islam*. Dar al-Ma'arif.
- Ismail, A. U. (2015). Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 45-57. <https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9766>
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (I)*. Paradigma.
- Kesuma, A. S. (2017). Pemikiran Politik Abu Al-'La Al-Mawdudi. *Kalam*, 9(2), 323. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.335>
- M. Kholid Muslih at All. (2019). *Tradisi Intelektual Islam (A. Wahid (Ed.); I)*. Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157-164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>
- Muhammad Fajar Pramono. (2016). Studi Pola Komunikasi Pemerintah dan Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat. *Agritexts*, XL, 15-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/agritexts.v40i1.42636>
- Nu'man Abdul Razaq. (2007). *al-Nizhom as-Siyasi fil Islam (II, p. 832)*. Jami'u Huquq Mahfuzhoh lil Muallif.
- Nyoman Kutha Ratna. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, P. (2016). Distansiasi dan Apropriasi dalam Hermeneutika Sebuah Tinjauan Hermeneutika Paul Ricoeur. *Caritas pro Serviam*, XXXIII(November), 67-77.
- Ritaudin, M. S. (2017). Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah. *Kalam*, 6(1), 151. <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.399>
- Saputra, G. E. (2019). Konsep Masyarakat Syekh Siti Jenar dalam Novel heptalogy Karya Agus Sunyoto. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sayyid Qutb. (1990). *Al-'Ada>lah al-Ijtima>'iyah fil Islam*. Dar al-Syuruq.
- Shonia, C. A., & Hermawati, L. (2020). Pemikiran Politik Abu a'La Almaududi. *Journal ISTIGHNA*, 3(1), 12-31. <https://doi.org/10.33853/istighna.v3i1.41>
- Sujadi, A. (2017). Moralitas Asketisme Syekh Siti Jenar: Studi Trilogi Syekh Siti Jenar Karya Agus Sunyoto. *Atavisme*, 20(2), 211-236. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v20i2.401.211-236>
- Sunyoto, A. (2004a). *Suluk Abdul Jalil (Perjalanan Ruhani) Syekh Siti Jenar 1 (1st ed.)*. LKiS.
- Sunyoto, A. (2004b). *Suluk Abdul Jalil (Perjalanan Ruhani) Syekh Siti Jenar 2 (2nd ed.)*. LKiS.
- Sunyoto, A. (2004c). *Suluk Malang Sungsang (Konflik dan Penyimpangan Ajaran Syekh Siti Jenar) 7 (7th ed.)*. LKiS.
- Sunyoto, A. (2004d). *Suluk Sang Pembaharu (Perjuangan dan Ajaran) 5 (5th ed.)*. LKiS.

- Sunyoto, A. (2004e). *Suluk Sang Pembaharu (Perjuangan dan Ajaran) Syekh Siti Jenar 3* (3rd ed.). LKiS.
- Sunyoto, A. (2004f). *Suluk Sang Pembaharu (Perjuangan dan Ajaran) Syekh Siti Jenar 4* (4th ed.). LKiS.
- Sunyoto, A. (2004). *Suluk Malang Sungsang (Konflik dan Penyimpangan Ajaran) Syekh Sit Jenar 6* (6th ed.). LKiS.

P-ISSN : 2085-2487

E-ISSN : 2614-3275

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

Risalah

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Volume 9, No. 1, Maret 2023

Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia
www.faiunwir.ac.id